

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Potret Intanpari Kabupaten Semarang dalam Sudut Pandang Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis karena mengelilingi Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi. Secara administratif, pusat pemerintahan Kabupaten Semarang berada di Ungaran, yang sejak tahun 1983 ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Wilayah yang memiliki kepadatan permukiman tertinggi adalah Kecamatan Ungaran Barat dan koridor sepanjang jalur Semarang-Bawen, sementara wilayah dengan sebaran penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bancak. Secara agama, mayoritas penduduk Kabupaten Semarang menganut Islam sebesar 92%, diikuti Kristen Protestan 4%, Kristen Katolik 3%, dan Buddha 1% (Cjip.jatengprov.go.id, 2024).

Dari segi sosial, Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang tergolong tinggi di tingkat Jawa Tengah, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat (Badan Pusat Statistik Semarang, 2025). Struktur sosial masyarakatnya didominasi oleh suku Jawa dengan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, meskipun bahasa Indonesia digunakan secara luas

dalam kegiatan formal. Tingkat partisipasi pendidikan terus meningkat, didukung oleh ketersediaan fasilitas sekolah dari tingkat dasar hingga menengah serta perguruan tinggi di sekitar wilayah Kabupaten Semarang.

Dari sudut segi sosial budaya, Kabupaten Semarang sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa yang masih kuat. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap adat dan tradisi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kesenian tradisional seperti kuda lumping, wayang kulit, dan kesenian rakyat lainnya masih dipentaskan dalam acara-acara adat maupun perayaan tertentu. Upaya pelestarian budaya dilakukan melalui kegiatan kebudayaan daerah serta pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Keharmonisan antarumat beragama juga terjaga dengan baik melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun dialog dan toleransi sosial di tengah masyarakat yang majemuk (Humas.jatengprov.go.id, 2026).

Secara segi sudut pandang ekonomi, menerangkan bahwa Kabupaten Semarang terkenal dengan slogan Intanpari, yaitu singkatan dari Industri, Pertanian, dan Pariwisata, yang telah menjadi identitas pembangunan ekonomi daerah sejak dekade 1990-an. Slogan ini merefleksikan tiga pilar utama perekonomian yang saling menopang dan melengkapi satu sama lain (Purwanto, 2022). Sektor industri menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Semarang, terutama industri pengolahan yang banyak tersebar di koridor Ungaran, Bergas, dan Bawen. Kawasan industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. Keberadaan

kawasan industri ini juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti jasa, transportasi, dan perdagangan.

Sektor pertanian tetap menopang perekonomian daerah, terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Getasan dan Bandungan yang dikenal sebagai penghasil sayuran, bunga, dan komoditas hortikultura. Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya juga terkenal dengan produksi bawang merah. Sementara itu, sektor pariwisata berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kehadiran berbagai destinasi wisata alam dan budaya seperti kawasan Bandungan, Gedong Songo, Rawa Pening, dan beragam desa wisata berbasis kearifan lokal (Purwanto, 2022).

Dari aspek politik, Kabupaten Semarang menerapkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah. Pemerintah daerah juga melaksanakan perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan unsur masyarakat (Sekertariat Daerah Kabupaten Semarang, 2025).

Peta politik di Kabupaten Semarang dalam tiga kali pemilihan umum legislatif memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Hal itu tampak dari perolehan kursi partai politik pada Pileg Tahun 2014, Pileg Tahun 2019, dan Pileg Tahun 2024 di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, sebagai salah satu entitas politik strategis di Jawa Tengah,

merepresentasikan sebuah laboratorium politik yang dinamis di mana kekuatan nasionalis-sekuler dan religius-tradisionalis saling berkontestasi sekaligus berakulturasi. Dalam lanskap politik pasca-reformasi, wilayah ini dikenal sebagai salah satu basis pertahanan PDI Perjuangan yang sering dikiaskan sebagai "*Kandang Banteng*" (Imami, 2024). Namun, dominasi partai semata tidak lagi menjadi variabel tunggal dalam menentukan kemenangan elektoral. Munculnya figur Ngesti Nugraha sebagai sentralitas kekuasaan baru dari seorang legislator menjadi eksekutif yang dominan menandai pergeseran pola politik dari mesin partai murni menuju personalisasi politik yang didukung oleh jaringan patronase yang kompleks.

Pada Pemilu Tahun 2024, PDI Perjuangan kembali membuktikan dominasinya dengan meraih suara terbanyak sebesar 154.029 suara, jauh melampaui PKB (29.219 suara), Partai Nasdem (26.528 suara), dan Partai Golkar (21.549 suara). Konfigurasi perolehan suara ini berdampak langsung pada komposisi DPRD Kabupaten Semarang dan dinamika Pilkada Tahun 2024, di mana koalisi pemenang berhasil menghimpun dukungan 14 partai dari total 17 partai yang ada (Imami, 2024).

Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2024 merupakan salah satu proses politik penting oleh para kontestan yang terlibat. Proses kontestasi mencakup pertarungan antara sejumlah kandidat yang bertarung untuk memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam konteks ini, Ngesti Nugraha muncul sebagai petahana yang kembali memenangkan pertarungan tersebut. Keberhasilan kemenangan ini tidak lepas dari strategi jaringan aktor politik yang terlibat dalam

kampanye, baik itu struktur partai, relawan akar rumput, tokoh masyarakat, maupun dukungan elit lokal yang memiliki modal sosial dan sumber daya politik.

Bab ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif anatomi kekuatan politik Ngesti Nugraha dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Semarang Tahun 2024. Analisis ini tidak hanya menyajikan kronologi linear, melainkan sebuah eksplanasi mendalam mengenai transformasi modalitas politik sang petahana, identifikasi aktor-aktor kunci yang bekerja di balik layar (*back-office politics*), serta bagaimana dinamika makro-politik di tingkat nasional dan provinsi mengintervensi kontestasi lokal. Melalui pendekatan ekonomi-politik dan sosiologi pemilih, bab ini akan memetakan bagaimana Ngesti Nugraha mengorkestrasikan jaringan birokrasi desa (Hamong Projo), struktur partai (KomandanTe Stelsel), dan legitimasi religius (Nahdlatul Ulama) menjadi sebuah kekuatan hegemonik di Pilkada Tahun 2024.

2.1. Perjalanan dan Karir Politik Ngesti Nugraha: Langkah Awal Menjadi Anggota DPRD Hingga Menuju Bupati Semarang Dua Periode

Karir politik Ngesti Nugraha bukanlah sebuah fenomena instan, melainkan hasil dari akumulasi pengalaman panjang dalam menavigasi struktur kekuasaan lokal. Perjalanannya merefleksikan sebuah studi kasus klasik mengenai mobilitas vertikal politisi lokal di Indonesia. Bermula dari penguasaan basis massa di tingkat legislatif, beralih menjadi wakil kepala daerah (wakil bupati) untuk mempelajari birokrasi, dan akhirnya mengkonsolidasikan kekuasaan sebagai bupati petahana.

Ngesti Nugraha merupakan tokoh politik daerah yang dikenal melalui kiprahnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lahir di Kabupaten Semarang dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai gotong royong dan adat istiadat daerah. Dimensi ideologi kerakyatan dari PDIP mengedepankan pendekatan populis yang berpihak pada rakyat kecil, sering disebut sebagai partai "*kiri*" yang progresif (bukan komunis/sosialis tradisional), melainkan kiri dalam konteks keberpihakan pada struktur sosial rakyat.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ngesti Nugraha pernah bekerja sebagai kondektur bus jurusan Kopeng-Salatiga-Semarang. Pengalaman hidup sebagai kondektur inilah yang kemudian membentuk karakter kepemimpinannya yang dekat dengan masyarakat akar rumput. Pekerjaan tersebut menjadikannya memiliki jaringan pergaulan yang sangat luas dan dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, di Kabupaten Semarang terdapat idiom yang menyebut bahwa hampir separuh warga pernah bersalaman atau berjabat tangan dengannya sebuah modal sosial yang luar biasa dalam konteks politik elektoral (Dwi, 2025; Permana & Ihsanuddin, 2025).

Tabel 2. 1 Perjalanan Karir Politik Ngesti Nugraha

No.	Fase/Jabatan	Periode	Posisi/Pasangan	Partai Pengusung/ Koalisi	Lawan Kontestasi	Perolehan Suara	Hasil
1.	Ketua PAC PDIP Perjuangan Kecamatan Getasan	2002–2012	Ketua PAC	PDIP Perjuangan	-	-	Jabatan Internal Partai
2.	Anggota DPRD	2004–2009	Anggota Legislatif	PDIP Perjuangan	■	Suara terbanyak	Terpilih

	Kabupaten Semarang (Periode I)					kab. Semarang	
3.	Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Periode II)	2009–2014	Anggota Legislatif	PDI Perjuangan	▪	Suara tertinggi Kab. Semarang	Terpilih
4.	Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Periode III)	2014–2019	Anggota Legislatif	PDI Perjuangan	▪	Suara tertinggi Kab. Semarang	Terpilih
5.	Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang (Periode I)	2014–2019	Ketua DPC	PDI Perjuangan	▪	—	Jabatan internal partai
6.	Pilkada Kabupaten Semarang 2015	2016–2021	Wakil Bupati berpasangan dengan dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG (Pasangan "Mukti")	PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, Partai Demokrat	Nur Jatmiko – Mas'ud Ridwan (Jatimas)	316.420 suara (64,9%) lawan 170.928 suara (35,1%), Total suara sah 487.348	Menang — Dilantik 17 Februari 2016
7.	Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang (Periode II)	2019–2024	Ketua DPC	PDI Perjuangan	▪	▪	Jabatan internal partai

8.	Pilkada Kabupaten Semarang 2020	2021–2024	Calon Bupati berpasangan dengan H. Basari (Pasangan "Ngebas")	PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, Partai Demokrat	Bintang Narsasi–Gunawan Wibisono (Bison) diusung: PPP, PKS, Golkar, Gerindra, PAN, NasDem	386.222 suara (67,1%) lawan 189.264 suara (32,9%), Total suara sah 575.486, DPT 770.593, Partisipasi 78,7%	Menang — Dilantik 26 Februari 2021 oleh Gubernur Ganjar Pranowo
9.	Bupati Semarang (Periode I)	2021–2024	Bupati	PDI Perjuangan	▪	▪	Menjabat
10.	Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang (Periode III)	2025–2030	Ketua DPC	PDI Perjuangan	▪	▪	Jabatan internal partai (Hattrick)
11.	Pilkada Kabupaten Semarang 2024	2025–2029	Calon Bupati berpasangan dengan Nur Arifah (Pasangan "Mutiarra")	PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, Hanura, Perindo, Buruh, PSI, Gelora, Ummat (14 Partai)	Nurul Huda–Yarmuji diusung: PPP (1 Partai)	445.567 suara (80,26%) lawan 109.571 suara (19,74%), DPT 807.204, Partisipasi 74,8%	Menang — Ditetapkan KPU 9 Januari 2025, Dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto

Sumber. Diolah oleh Peneliti, 2026.

Latar belakang sosial tersebut membentuk karakter kepemimpinan Ngesti Nugraha yang populis dan merakyat. Dimensi ideologi kerakyatan dari PDI Perjuangan yang mengedepankan pendekatan keberpihakan pada rakyat kecil sangat cocok dengan karakter personalnya. Keterbatasan yang dialaminya sejak lahir, kemudian tumbuh dalam lingkungan yang keras, mengajarkannya tentang arti perjuangan dalam hidup, kesabaran, keteguhan, dan kepedulian terhadap sesama (Dwi, 2025).

Melalui partai DPC PDIP Kabupaten Semarang membangun ruang basis politik sekaligus memperluas jaringan sosial dan struktural di tingkat lokal. Aktivitasnya di internal partai mencakup konsolidasi kader, penguatan struktur organisasi, serta advokasi kepentingan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Ideologisasi dilakukan secara struktural melalui pendidikan politik (kaderisasi) yang ketat untuk menanamkan militansi dan kesetiaan pada ajaran partai dan menekankan gotong royong dan berakar pada kebudayaan Indonesia.

2.1.1 Fase Fondasi: Penguasaan Akar Rumput Melalui Partai Politik dan

Anggota Legislatif (2002-2015)

Karir politik Ngesti Nugraha bukanlah sebuah fenomena instan, melainkan hasil dari akumulasi pengalaman panjang dalam menavigasi struktur kekuasaan lokal. Keterlibatan politiknya dimulai melalui aktivitas di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat kecamatan. Pada periode 2002-2012, ia menjabat sebagai Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) PDI Perjuangan Kecamatan Getasan sebuah jabatan strategis yang memungkinkannya

membangun basis massa secara organik di akar rumput (Arsyad, 2025; Permana & Ihsanuddin, 2025).

Melalui DPC PDIP Kabupaten Semarang membangun ruang basis politik sekaligus memperluas jaringan sosial dan struktural di tingkat lokal. Aktivitasnya di internal partai mencakup konsolidasi kader, penguatan struktur organisasi, serta advokasi kepentingan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Ideologisasi dilakukan secara struktural melalui pendidikan politik (kaderisasi) yang ketat untuk menanamkan militansi dan kesetiaan pada ajaran partai, sekaligus menekankan nilai gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat.

Gambar 2. 1 Ngesti Nugraha saat Menjadi Anggota DPRD Kab. Semarang



Sumber: Media Sosial DPD PDI Perjuangan Kab. Semarang

Puncak dari kerja keras membangun basis politik di akar rumput tersebut kemudian mengantarkan Ngesti Nugraha ke kursi legislatif daerah. Ngesti Nugraha terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang dan berhasil mempertahankan kursinya selama tiga periode berturut-turut: periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan periode 2014-2019 (Alumniprofile.undip.ac.id, 2024). Capaian tiga periode legislatif ini merupakan bukti nyata kuatnya dukungan konstituen dan kemampuannya dalam membangun serta mempertahankan jaringan politik yang solid.

Hampir runtutan tahun yang sama juga bahwa Ngesti Nugraha *Hattrick* menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang terbukti memimpin ketiga kalinya sebagai Ketua Cabang (2014-2019, 2019-2024, dan 2025-2030 (Shodiq, 2025). Rekam jejak di internal partai dan di ruang pertarungan politik Kabupaten Semarang menjadi bukti kepercayaan akar rumput atas dedikasinya berjuang di jalur politik dan pengabdian kepada masyarakat sejak menjadi anggota DPRD hingga menjadi Bupati terpilih.

Selama mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok pedagang pasar dan masyarakat pedesaan. Konsistensi advokasi terhadap kelompok ini kemudian menjadi salah satu landasan dukungan yang kuat, terbukti ketika para pedagang pasar secara aktif mendukung pencalonannya sebagai Bupati pada Pilkada Tahun

2020, dengan alasan bahwa telah memberikan bukti dan kerja nyata bagi kepentingan mereka secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fase Aliansi Taktis: Wakil Bupati dan "*Magang*" Eksekutif (2016-2020)

Setelah menyelesaikan tiga periode di legislatif, Ngesti Nugraha mengambil langkah strategis untuk beralih ke jalur eksekutif. Pada periode 2015, ia dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, sebuah posisi yang semakin mengukuhkan otoritasnya di dalam struktur partai sekaligus memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah kabupaten (Arsyad, 2025; Permana & Ihsanuddin, 2025).

Pada Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2015, Ngesti Nugraha berhasil terpilih sebagai Wakil Bupati Semarang, berpasangan dengan dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG yang menjabat sebagai Bupati untuk periode 2016-2021 (Imami, 2024; Saputra, 2024). Kemenangan pada Pilkada Tahun 2015 tersebut bukanlah sebuah keberhasilan yang datang secara tiba-tiba, melainkan merupakan buah yang matang dari proses akumulasi modal sosial, modal politik, dan modal kepercayaan publik yang telah dibangun secara sabar dan konsisten selama lebih dari satu dekade sejak ia mulai aktif di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Getasan pada tahun 2002 hingga tiga periode penuh sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang. Keputusannya untuk maju ke jalur eksekutif melalui posisi Wakil Bupati alih-alih langsung mencalonkan diri sebagai Bupati mencerminkan kecerdasan strategis seorang politisi yang memahami bahwa

penguasaan ranah eksekutif memerlukan landasan pengalaman yang tidak dapat diimprovisasi.

Periode 2016-2021 sebagai Wakil Bupati Semarang merupakan fase yang paling kritis dan paling formatif dalam keseluruhan perjalanan karir politik Ngesti Nugraha sebuah fase "*magang*" yang sistematis, terencana, dan sangat produktif di ranah eksekutif pemerintahan daerah. Frasa "*magang*" di sini tentu bukan bermakna pasif atau subordinat semata, melainkan mengandung makna yang jauh lebih aktif dan strategis: yakni sebuah proses pembelajaran intensif yang dilakukan secara deliberatif untuk mempersiapkan diri menapaki tangga kekuasaan yang lebih tinggi dengan modal kompetensi dan pengalaman yang jauh lebih matang. Sebagai Wakil Bupati, Ngesti Nugraha tidak sekadar menjalankan fungsi seremonial atau menjadi pelengkap struktural dalam pemerintahan, melainkan secara aktif memanfaatkan posisinya sebagai jendela strategis untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam seluk-beluk tata kelola pemerintahan daerah yang sesungguhnya.

Dalam kapasitas tersebut, ia tidak hanya memiliki akses privileged terhadap birokrasi pemerintahan daerah di semua tingkatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten hingga aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa tetapi juga mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk mempelajari secara langsung dan mendalam mekanisme pengelolaan pemerintahan yang kompleks, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,

mekanisme koordinasi lintas OPD, hingga dinamika hubungan antara eksekutif dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mencakup legislatif (DPRD), pemerintah pusat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas-komunitas lokal di seluruh penjuru Kabupaten Semarang.

Pengalaman langsung dalam mengelola birokrasi yang besar dan kompleks ini memberikan Ngesti Nugraha sebuah *tacit knowledge* pengetahuan praktis yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan tidak dapat dipelajari dari buku teks maupun seminar politik manapun yang kelak menjadi salah satu keunggulan kompetitif terbesar yang membedakannya secara signifikan dari kandidat-kandidat lain yang tidak memiliki pengalaman eksekutif serupa pada Pilkada Tahun 2020 maupun Pilkada Tahun 2024.

Lebih jauh dari itu, periode sebagai Wakil Bupati juga memberikan Ngesti Nugraha platform yang sangat strategis untuk memperluas dan memperdalam jaringan politiknya secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, membangun hubungan yang lebih intens dengan pejabat-pejabat pemerintah pusat, pimpinan kementerian, dan jaringan politik di tingkat provinsi Jawa Tengah. Secara horizontal, ia semakin memperkuat penetrasi jaringannya hingga ke tingkat desa melalui intensifikasi hubungan dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat lokal yang tersebar di 235 desa dan 16 kelurahan di seluruh Kabupaten Semarang. Penguasaan jaringan birokrasi desa yang semakin solid dan terstruktur

selama periode inilah yang kelak menjadi salah satu instrumen mobilisasi paling efektif dalam mesin kemenangan Pilkada Tahun 2020 dan yang semakin diperkuat pada Pilkada Tahun 2024.

Gambar 2. 2 Pasangan Bupati Semarang Mundjirin (kiri) dan Wakilnya Ngesti Nugraha (kanan)



Sumber: (Antarafoto.com, 2015).

Fase Wakil Bupati ini juga memberikannya platform yang sangat strategis untuk membangun legitimasi sebagai calon bupati di masa mendatang. Dengan posisi tersebut, ia dapat menunjukkan kemampuan kepemimpinannya secara langsung kepada masyarakat, sekaligus memperluas jaringan birokrasi hingga ke tingkat desa. Penguasaan jaringan

birokrasi desa inilah yang kelak menjadi salah satu instrumen kunci dalam kemenangan Pilkada 2020 dan Pilkada Tahun 2024.

2.1.3 Fase Perebutan Tahta: Kemenangan di Pilkada Tahun 2020

Pada Pilkada 2020, Ngesti Nugraha akhirnya melangkah maju sebagai calon Bupati Semarang. Ia berpasangan dengan H. Basari (yang dikenal dengan akronim "Ngebas"). Pasangan ini mendapat dukungan dari koalisi partai yang terdiri dari PDI-P, PKB, Hanura, dan Partai Demokrat. Dukungan koalisi ini merupakan buah dari kerja politik jangka panjang yang dijalani Ngesti Nugraha selama bertahun-tahun di berbagai jabatan yang diembannya.

Selain dukungan yang mengalir dari mesin partai politik yang telah terkonsolidasi dengan baik, pasangan Ngesti Nugraha-Basari pada Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2020 juga mendapatkan dukungan yang sangat luas dan beragam dari berbagai elemen masyarakat sipil (*civil society*) dan organisasi massa yang tersebar di berbagai penjuru Kabupaten Semarang. Keragaman elemen pendukung ini bukan sebuah kebetulan semata, melainkan merupakan hasil dari proses akumulasi modal sosial yang dibangun secara sabar dan konsisten oleh Ngesti Nugraha selama lebih dari satu dekade interaksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat dari kalangan pemuda, komunitas olahraga, kelompok etnis, hingga pelaku ekonomi informal di pasar-pasar tradisional.

Di antara organisasi massa yang secara terbuka dan aktif menyatakan dukungannya kepada pasangan Ngesti-Basari adalah MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang sebuah organisasi kepemudaan berpengaruh yang memiliki jaringan anggota yang luas di berbagai kecamatan di Kabupaten Semarang dan dikenal memiliki kapasitas mobilisasi massa yang signifikan dalam kontestasi politik lokal. Selain itu, dukungan juga datang dari komunitas olahraga bela diri, yakni Tarung Bebas Indonesia dan *Satria Boxing Club* dua organisasi yang tidak hanya mewakili komunitas atlet dan pelatih olahraga bela diri, tetapi juga memiliki basis anggota yang tersebar di berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Kehadiran dukungan dari komunitas olahraga ini mencerminkan kemampuan Ngesti Nugraha dalam membangun kedekatan yang autentik dengan komunitas-komunitas yang kerap diabaikan dalam kalkulasi politik elektoral konvensional. Tidak kalah signifikan, dukungan juga mengalir dari Paguyuban Masyarakat Minang Semarang sebuah organisasi kekerabatan komunitas perantau Minangkabau yang menetap dan beraktivitas ekonomi di Kabupaten Semarang. Keterlibatan paguyuban ini menggarisbawahi fakta bahwa Ngesti Nugraha berhasil membangun legitimasi yang melampaui batas-batas identitas etnis dan kedaerahan, menjadikannya kandidat yang dipandang relevan dan dapat dipercaya bahkan oleh komunitas perantau yang tidak berasal dari budaya Jawa.

Dukungan yang paling bermakna secara simbolis sekaligus paling organik secara sosiologis datang dari kalangan pedagang pasar yang tersebar

di berbagai pasar tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Para pedagang pasar ini secara aktif, sukarela, dan antusias memberikan dukungan nyata kepada pasangan Ngesti-Basari bukan karena mobilisasi yang bersifat transaksional atau instruksi dari struktur organisasi tertentu, melainkan semata-mata karena mereka telah merasakan secara langsung, nyata, dan berkelanjutan manfaat konkret dari advokasi yang dilakukan Ngesti Nugraha selama tiga periode penuh mengemban amanat sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang. Selama masa legislatifnya, Ngesti Nugraha dikenal sebagai sosok wakil rakyat yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan pedagang pasar mulai dari upaya perbaikan infrastruktur pasar, advokasi kebijakan yang melindungi pedagang kecil dari ancaman penggusuran dan persaingan tidak sehat dengan pasar modern, hingga fasilitasi akses permodalan bagi pedagang yang membutuhkan dukungan finansial untuk mengembangkan usahanya. Rekam jejak advokasi yang panjang, konsisten, dan dapat dibuktikan secara nyata inilah yang mengonversi rasa terima kasih dan kepercayaan para pedagang menjadi dukungan elektoral yang solid, terorganisir, dan berdampak signifikan. Dalam perspektif Teori Modal Sosial Lin (2004), fenomena ini merupakan ilustrasi paling sempurna dari mekanisme *return on social investment* di mana investasi sosial berupa advokasi dan pelayanan yang tulus kepada komunitas tertentu selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan *return* berupa dukungan politik yang kuat, loyal, dan berkelanjutan pada saat kontestasi elektoral berlangsung.

Gambar 2. 3 Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang

oleh KPU pada Pilkada 2020



Sumber: KPU Kabupaten Semarang, 2020

Hasilnya, pasangan Ngesti Nugraha-Basari berhasil memenangkan Pilkada Tahun 2020 dengan meraih 386.222 suara, mengalahkan pasangan Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono. Ngesti Nugraha dan Basari kemudian dilantik secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bersama kepala daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Jawa Tengah (Rosa, 2021; Setiawan et al., 2020).

Salah satu program unggulan yang dipromosikan pasangan ini adalah program "NGOPI" (Ngobrol Penuh Inspirasi) atau "Ngolah Pikir"

sebuah forum dialog antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat yang digelar di berbagai wilayah kabupaten. Program ini bukan hanya simbol kedekatan pemimpin dengan rakyat, tetapi juga merupakan instrumen penyerapan aspirasi yang efektif sekaligus mempererat jaringan sosial antara pemerintah dan masyarakat.

2.1.4 Fase Petahana Hegemonik: Kemenangan Mutlak di Pilkada 2024

(Pasangan "Mutiara")

Menjelang Pilkada 2024, Ngesti Nugraha kembali maju sebagai calon petahana. Kali ini ia berpasangan dengan Nur Arifah, seorang perempuan yang dikenal sebagai Kepala Desa Rembes di Kecamatan Bringin dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Semarang. Komposisi pasangan ini yang kemudian dikenal dengan branding "Mutiara" (Ngesti-Nur Arifah) merupakan kalkulasi politik yang sangat cermat. Penggabungan figur Ngesti yang berbasis pada mesin PDI Perjuangan dan jaringan birokrasi desa, dengan sosok Nur Arifah yang memiliki legitimasi religius dari basis massa Nahdlatul Ulama, menciptakan sinergi kekuatan yang sulit ditandingi (Imami, 2024; Saputra, 2024).

Koalisi pendukung pasangan Ngesti Nugraha–Nur Arifah dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2024 terbentuk dalam konfigurasi politik yang sangat besar dan solid. Pasangan ini didukung oleh gabungan 14 partai politik yang mencakup hampir seluruh spektrum kekuatan politik nasional maupun lokal, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan

Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Ummat. Besarnya dukungan lintas partai tersebut menunjukkan adanya konsolidasi politik yang sangat kuat terhadap pasangan petahana, sekaligus mencerminkan tingginya tingkat penerimaan elite politik daerah terhadap kepemimpinan yang telah dibangun selama periode sebelumnya.

Koalisi yang sangat luas ini tidak hanya memberikan keuntungan secara administratif dalam proses pencalonan, tetapi juga menciptakan kekuatan mobilisasi politik yang besar hingga ke tingkat akar rumput. Setiap partai pendukung memiliki struktur organisasi, jaringan kader, serta basis massa masing-masing yang kemudian bekerja secara kolektif dalam memenangkan pasangan Ngesti–Nur Arifah. Dengan bersatunya berbagai kekuatan politik tersebut, pasangan ini memperoleh dukungan yang relatif merata di berbagai wilayah Kabupaten Semarang, baik melalui jaringan formal partai maupun melalui relasi sosial-politik yang telah dibangun sebelumnya.

Di sisi lain, pasangan penantang, yaitu Nurul Huda–Yarmuji, hanya diusung oleh satu partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Ketimpangan dukungan politik ini menunjukkan adanya perbedaan kekuatan koalisi yang sangat signifikan antara kedua pasangan calon. Kondisi tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa kontestasi

Pilkada Kabupaten Semarang 2024 berlangsung dalam situasi dominasi politik yang kuat dari kubu petahana, baik dari sisi dukungan elite partai maupun kemampuan konsolidasi jaringan politik di tingkat masyarakat (Imami, 2024; Saputra, 2024).

Gambar 2. 4 Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang oleh KPU pada Pilkada 2024



Sumber: KPU Kabupaten Semarang, 2026

Hasilnya adalah kemenangan mutlak yang tidak terbantahkan. Berdasarkan data KPU yang dihimpun dari 1.979 dari total 1.984 TPS, pasangan Ngesti Nugraha-Nur Arifah berhasil meraih 444.335 suara atau 80,24% dari total suara sah. Sementara pasangan Nurul Huda-Yarmuji hanya memperoleh 109.412 suara atau 19,76% (Saputra, 2024). Kemenangan dengan selisih yang sangat besar ini mencerminkan kuatnya

konsolidasi jaringan kemenangan yang telah dibangun Ngesti Nugraha selama bertahun-tahun.

Pasangan Ngesti Nugraha-Nur Arifah kemudian dilantik secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2025-2029 dalam pelantikan serentak kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025 (Ihsanuddin & Dian, 2025). Kemenangan ini sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karir politik Ngesti Nugraha sebagai pemimpin daerah yang berhasil mempertahankan kekuasaan untuk periode kedua dengan fondasi jaringan aktor kemenangan yang sangat kuat dan terstruktur.

Secara keseluruhan, perjalanan karir politik Ngesti Nugraha merefleksikan sebuah studi kasus klasik mengenai mobilitas vertikal politisi lokal di Indonesia: bermula dari penguasaan basis massa di tingkat akar rumput partai, memanfaatkan tiga periode legislatif untuk membangun jaringan dan legitimasi, beralih ke posisi wakil kepala daerah (wakil bupati) sebagai "*magang*" eksekutif, dan akhirnya mengkonsolidasikan seluruh kekuatan tersebut untuk memenangkan kontestasi kepala daerah secara berturut-turut. Dinamika ini yang menjadi daya modal utama dalam menjalankan perjalanan dan karir politik hingga saat ini.

Secara keseluruhan, perjalanan karir politik Ngesti Nugraha dari seorang kondektur bus jurusan Kopeng-Salatiga-Semarang hingga menjadi Bupati Kabupaten Semarang dua periode merupakan narasi politik yang paling autentik

tentang bagaimana modal sosial yang dibangun secara organik dari bawah mampu menghasilkan kekuatan elektoral yang luar biasa dan berkelanjutan. Empat fase perjalanan politiknya mulai dari fase fondasi penguasaan akar rumput melalui PAC PDI Perjuangan dan tiga periode legislatif (2004–2019), fase aliansi taktis sebagai Wakil Bupati yang sekaligus menjadi "*magang*" eksekutif (2016–2020), fase perebutan tahta melalui kemenangan Pilkada pertama bersama Basari (2020), hingga fase petahana hegemonik dengan kemenangan mutlak 80,24 persen bersama Nur Arifah dalam Pilkada 2024 semuanya bukan merupakan lompatan-lompatan keberuntungan yang berdiri sendiri, melainkan tahapan-tahapan yang saling terkoneksi dalam sebuah trajektori politik yang terencana, konsisten, dan bertahap.

Setiap jabatan yang diemban Ngesti Nugraha selalu difungsikan bukan sekadar sebagai posisi formal, tetapi sebagai instrumen aktif untuk memperluas jaringan, memperdalam kepercayaan publik, dan mempertebal legitimasi di mata berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Semarang. Keputusannya memilih Nur Arifah sebagai pasangan calon pada Pilkada 2024 yang secara simultan mengintegrasikan jaringan birokrasi desa dan jaringan organisasi keagamaan terbesar melalui satu keputusan strategis merupakan distilasi dari kematangan kalkulasi politik yang hanya bisa dimiliki oleh seorang politisi yang telah melewati proses pembentukan karakter dan kapasitas selama lebih dari dua dekade.

Dengan demikian, studi kasus Ngesti Nugraha bukan sekadar cerita tentang seorang individu yang berhasil dalam kontestasi politik lokal, melainkan sebuah model representatif tentang bagaimana kepemimpinan berbasis *grassroots*, investasi modal sosial jangka panjang, dan adaptasi strategis terhadap dinamika

sosial-kultural setempat mampu menghasilkan legitimasi politik yang kokoh, tahan uji, dan pada akhirnya mengantarkan kemenangan mutlak dalam dua kali kontestasi Pilkada secara berturut-turut di Kabupaten Semarang.